

The Economic Activities of the Chinese Ethnic Groups in Palembang in 1930 to 1942

By:
Sri Lestari
12407144001
Email: yunrikim3@gmail.com

ABSTRACT

Palembang city had a very strategic location as a destination for trading in *Nusantara* (archipelago). In the 16th century to the 20th century, there was a migration flow of Chinese people from China to *Nusantara*. Palembang became one of the cities chosen for the migration in *Nusantara*. As a result, many Chinese people decided to settle in Palembang. During 1930 to 1942, Chinese ethnic groups had an important role in economy including the brokerage. This research is aimed to reveal the economic activities of the Chinese ethnic groups during the period of 1930 to 1942. The results show that there were economic activities carried out by the Chinese ethnic groups in Palembang during 1930 to 1942. The economic activities carried out by the groups were brokerage, *Mindring*, loan (*Renten*), and a rubber processing industry. This ethnic groups became the broker for coffee and rubber. Chinese traders ran the *Mindring* practice and loan devoted to indigenous people in rural areas. Another role run by the Chinese ethnic groups was the rubber processing industry. There were two major rubber processing companies owned by the groups i.e. *Kian Gwan* and *NV Hok Tok*. The economic activities of these groups had some impacts on various stakeholders such as the colonial government, indigenous people, and fellow Chinese ethnic groups i.e. *Totok* and *Peranakan*. One of the manifestations of these impacts was the enactment of *Wijkenstelsel* and *Passenstelsel* policies. Both of these policies were made in an attempt to monitor all kinds of movement done by the Chinese ethnic groups in Palembang city.

Keywords: *Economic activities, Chinese, Palembang*

Ativitas Ekonomi Etnis Tionghoa di Palembang Tahun 1930-1942

Oleh: Sri
Lestari
12407144001
Email: yunrikim3@gmail.com

ABSTRAK

Palembang memiliki letak wilayah yang sangat strategis sebagai tujuan perdagangan di Nusantara. Pada abad ke-16 sampai abad ke-20, terjadi arus migrasi orang Tionghoa dari negara Cina sampai ke wilayah Nusantara. Kota Palembang, menjadi salah satu tujuan migrasi orang Tionghoa di Nusantara. Akibat migrasi tersebut, banyak orang Tionghoa yang memilih untuk tinggal dan menetap di Palembang. Mayoritas dari etnis Tionghoa di Palembang berperan sebagai pedagang perantara. Selama periode 1930-1942, etnis Tionghoa memiliki peran penting dalam sektor perekonomian kota Palembang. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui aktivitas ekonomi etnis Tionghoa selama periode 1930-1942. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh etnis Tionghoa di Palembang selama tahun 1930-1942. Aktivitas ekonomi yang dijalankan etnis ini adalah bidang perdagangan perantara, *Mindring* dan praktek memberikan pinjaman uang (*renten*) serta bidang industri pengolahan karet. Etnis Tionghoa menjadi pedagang perantara untuk komoditas kopi dan karet. Praktek *Mindring* dan peminjaman uang dijalankan oleh pedagang Tionghoa untuk masyarakat pribumi di kawasan pedesaan. Peran lain yang dijalankan adalah bidang industri pengolahan karet. Terdapat dua perusahaan besar pengolahan karet milik etnis Tionghoa yaitu *Kian Gwan* dan *NV Hok Tok*. Aktivitas ekonomi etnis Tionghoa juga berdampak terhadap pihak kolonial, masyarakat pribumi dan sesama etnis Tionghoa yaitu kaum *Totok* dan *Peranakan*. Salah satu wujud dari dampak tersebut adalah berlakunya kebijakan *Wijkenstelsel* dan *Passenstelsel*. Kedua kebijakan ini dibuat sebagai upaya untuk mengawasi pergerakan dan perkembangan etnis Tionghoa di kota Palembang.

Kata Kunci: *Aktivitas Ekonomi, Tionghoa, Palembang*

A. PENDAHULUAN

Kedatangan orang-orang Tionghoa ke Nusantara menuju kota Palembang telah berlangsung dalam waktu yang lama bahkan sebelum masa kerajaan Sriwijaya. Hubungan yang terjalin antara nusantara dan orang Tionghoa, ialah melalui suatu hubungan perdagangan. Hubungan ini telah terjalin semenjak masa *Dinasti Han* (206 SM – 220 M). Banyak faktor yang menjadi pendorong terjadinya migrasi orang-orang Tionghoa sampai ke nusantara. Beberapa alasan tersebut seperti, adanya persaingan perdagangan di pesisir Laut Cina sehingga membuat pendapatan ekonomi penduduk setempat semakin berkurang.¹

¹ Nurani Soyomukti, *Soekarno & Cina: Nasionalisme Tionghoa Dalam Revolusi Indonesia*, (Yogyakarta: Garasi, 2012), hlm. 164.

Kedatangan etnis Tionghoa ke Nusantara, salah satunya merupakan bagian dari pola-pola migrasi seperti sebagai kuli, pedagang, dan sebagai perantau. Adapun kelompok atau suku bangsa Tionghoa yang datang ke Nusantara kebanyakan berasal dari etnis Hokkian, Hakka, Hainan, Hokchia, Theo Chio dan Kanton. Suku Hokkian merupakan suku terbanyak yang ada di Palembang. Hal tersebut dilihat berdasarkan lokasi persebaran dan mata pencarian atau keterampilan dari suku tersebut. Suku Hokkian merupakan suku bangsa yang berasal dari propinsi Fukien bagian selatan, suku ini banyak bekerja dalam bidang perdagangan.²

² Ayu Windy Kinasih, *Identitas Etnis Tionghoa di kota Solo (Etnis Tionghoa dan Heterogenitas Lokal)*, (Yogyakarta: Lab Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM, 2007), hlm. 86.

Peran etnis Tionghoa sebagai pedagang perantara, nantinya akan sangat berkaitan erat pada saat terjadi depresi ekonomi pada tahun 1930. Pada tahun 1930 Hindia Belanda mengalami krisis ekonomi besar-besaran yang umum dikenal sebagai masa depresi ekonomi. Depresi ekonomi terjadi pada tahun 1929 yang dimulai dengan kejatuhan bursa saham New York pada tanggal 24 Oktober 1929. Akibat yang ditimbulkan oleh depresi ekonomi ialah penurunan di bidang perekonomian terutama sektor perdagangan internasional dan sektor primer seperti hasil-hasil perkebunan.³

Peran etnis Tionghoa selama masa depresi ekonomi, tentu saja

membawa karakteristik tersendiri bagi kondisi perekonomian di kota Palembang. Setelah menghadapi masa-masa sulit akibat depresi ekonomi, kondisi perekonomian di Hindia Belanda lambat laun kembali stabil. Kedatang Jepang telah membawa babak baru bagi kehidupan orang-orang Tionghoa. Pada masa Jepang, etnis Tionghoa dituntut untuk semakin mempertahankan identitas mereka sebagai etnis pendatang di Hindia Belanda. Pada periode ini banyak usaha atau firma milik orang Tionghoa yang harus ditutup dan gulung tikar.⁴

³ Teguh Sihono, Krisis Finansial Amerika Serikat dan Perekonomian Indonesia, dalam *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, (Vol. 5, No. 2, Desember 2008), hlm. 174.

⁴ Twan Peck Yang, *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), hlm. 96.

B. ETNIS TIONGHOA DAN PERKEMBANGAN KOTA PALEMBANG TAHUN 1930-1942

Palembang terletak pada garis wilayah yang strategis serta mampu menjaga dan mempertahankan hubungan baik dengan dunia luar. Arti strategis yang dimiliki Palembang tidak hanya di karenakan letak geografis, topografi serta demografi nya saja.⁵ Pada periode akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 nilai strategis kota Palembang semakin bertambah. Abad ke-20 merupakan masa dimana Palembang mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan pada sektor perekonomian. Perkembangan

⁵ Jumhari, *Sejarah Sosial Orang Melayu, Keturunan Arab, dan Cina di Palembang dari masa*

Kesultanan Hingga Reformasi, (Padang: BPSNT Press, 2010), hlm. 27.

ini ditandai oleh terbukanya lahan perkebunan seperti tambakau, kopi dan karet. Perkembangan tersebut telah menarik pihak lain seperti kaum kapitalis barat untuk datang ke Hindia Belanda termasuk wilayah Palembang.⁶

Perkembangan juga terjadi pada etnis Tionghoa di Palembang. Keberadaan etnis Tionghoa di kota Palembang terus saja mengalami perkembangan baik secara kondisi politik sosial dan ekonomi. Migrasi secara besar-besaran etnis Tionghoa dimulai dari abad ke-16 sampai awal abad ke-20. Dari data statistik yang dibuat setelah sensus tahun 1930, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Tionghoa semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut

⁶ *Ibid.*

membuat populasi orang-orang Tionghoa di Palembang semakin meningkat.⁷

Perkembangan selanjutnya juga berpengaruh pada bidang pendidikan di kota Palembang. Pada tahun 1908-1911 Palembang telah memiliki delapan sekolah yang berpusat di ibukota. Di wilayah pedesaan juga mulai dibangun sekolah-sekolah rakyat untuk orang-orang pribumi. Terdapat sekolah ELS (*Europeesche Larger School*) yang di khususkan bagi penduduk Eropa serta terbatas bagi non-Eropa. Ada juga *Volkschool* (sekolah rakyat) yang dikenal dengan sebutan sekolah tiga tahun, sekolah ini

secara khusus lebih diperuntukkan bagi orang pribumi.⁸

Bagi etnis Tionghoa di Palembang, mereka tetaplah menjadi pihak minoritas. Hal tersebut kemudian mendorong etnis Tionghoa untuk mendirikan sekolahnya sendiri yang dikenal dengan nama sekolah THHK. Sekolah ini merupakan usaha untuk menghidupkan kembali budaya Tionghoa serta memberikan pendidikan yang layak bagi semua orang Tionghoa di Hindia Belanda. Sekolah THHK tersebar di berbagai wilayah salah satunya adalah Batavia, Yogyakarta, dan beberapa wilayah lainnya baik di Jawa maupun di luar Jawa. Jenis sekolah seperti ELS, HCS, *volkschool* (HIS) dan THHK

⁷ Beni. G. Setiyono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik*, (Jakarta: Transmedia, 2008), hlm. 40.

⁸ Ma'moen Abdullah, *Sejarah Daerah Sumatera Selatan*, (Sum-Sel: Depdikbud BPIP Sumatera Selatan, 1997/1998), hlm.67.

semuanya sama-sama setingkat dengan sekolah dasar.⁹

C. ETNIS TIONGHOA DALAM PEREKONOMIAN KOTA PALEMBANG TAHUN 1930-1942

Aktivitas ekonomi yang dijalankan etnis Tionghoa di Palembang secara umum terdiri dari pedagang perantara, mindring dan peminjaman uang, serta industri pengolahan komoditas karet. Ketiga aktivitas ini sering dilakukan dan sangat menonjol pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pedagang perantara merupakan aktivitas utama dari orang Tionghoa yang dikenal sebagai etnis pedagang.

⁹ Al.Heru Kustara, *Peranakan Tionghoa Indonesia Sebuah Perjalanan Budaya*, (Jakarta: Intisari Mediatama dan Komunitas Lintas Budaya, 2008), hlm. 31.

Pedagang perantara adalah mereka yang menjadi penghubung lalu lintas perdagangan internasional dan pihak perantara bagi penduduk setempat.¹⁰

Pedagang Tionghoa selalu menjadi pihak perantara baik bagi pemerintah kolonial, pemerintah lokal, maupun dengan orang-orang pribumi. Peran penting etnis Tionghoa dalam sektor perdagangan perantara berkembang sangat pesat dengan dikuasainya bisnis industri karet pada tahun 1930. Jaringan regional bisnis karet di Palembang yang dikuasai oleh orang Tionghoa juga ikut melibatkan pedagang atau pengusaha dari negara tetangga. Adapun negara tetangga yang sering menjadi mitra usaha orang

¹⁰ J.L. Vleming jr, *Kongsi dan Spekulasi Jaringan Kerja Bisnis Cina*, disadur oleh Bob Widayartono, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1988), hlm. 127.

Tionghoa adalah Singapura, Bombay (India), Karachi (Pakistan), Shanghai serta Hongkong.¹¹

Aktivitas ekonomi lainnya yang dijalankan oleh orang Tionghoa adalah *Mindring* dan usaha peminjaman uang (*renten*). Praktek *mindring* dan *renten* pada dasarnya tidak jauh berbeda. Pada masa kolonial tukang *mindring* biasanya juga merangkap sebagai *rentenir* (*renten*) yaitu meminjamkan uang dengan cara menyertakan bunga di setiap peminjamannya. Bagi usaha *mindring* barang yang di jual secara kredit memiliki harga yang lebih mahal jika dibanding harga pasaran. Jasa

¹¹ Alexander Irwan, *Jaringan*

Bisnis dan Identitas Etnis Transnasional, dalam I. Wibowo, *Harga yang harus Dibayar: Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama (Kerjasama dengan Pusat Studi Cina), 1999), hlm. 78.

peminjaman uang yang dilakukan oleh para *rentenir* akan dikenakan bunga atau biaya tambahan bagi para peminjamannya.¹²

Jumlah bunga yang diberikan biasanya sebesar 2 sen/hari untuk setiap gulden (1 gulden= 100 sen). Pemberian bunga atas peminjaman uang dianggap sebagai balas jasa bagi para *rentenir* yang sudah meminjamkan uangnya. Bunga peminjaman bisa mengalami kenaikan sewaktu-waktu tergantung pihak pemberi pinjaman. Hal tersebut yang membuat orang Tionghoa (*Rentenir*) di sebut lintah darat oleh orang-orang pribumi. Pembayaran hutang dan bunganya akan ditagih oleh

¹² Oeng Eng Die, *Peranan Etnis Tionghoa dalam Perdagangan* (terjemahan), dalam Mely G Tan (ed), *Etnis Tionghoa di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1979), hlm. 56.

tukang mindring atau rentenir setiap 2 hari sekali atau lebih tergantung kesepakatan.¹³

Pada masa ini, etnis Tionghoa juga bergerak di bidang industri pengolahan karet yaitu mendirikan pabrik Remiling di Palembang. Peran etnis Tionghoa di bidang ini, pada awalnya terjadi akibat kebijakan dari pemerintah kolonial yang melarang kepemilikan lahan atau tanah atas nama orang Tionghoa.¹⁴ Berlakunya peraturan dan kebijakan tersebut mendorong orang Tionghoa mencari peluang usaha lain yaitu dengan

¹³ V.B. van Gutem, "Tjina Mindring Eenige Aanteekeningen Over het Chineesche Geldschievterwezen op Java", *Koloniale Studien*, 1919, hlm. 113.

¹⁴ Tri Wahyuni. M. Irsyam, *Peranan Golongan Etnis Cina di Sektor Ekonomi di Jawa Pada masa Kolonial*, (Depok: LPUI, 1996), hlm. 22.

mendirikan industri untuk mengolah hasil perkebunan seperti karet. Terdapat dua perusahaan besar yang milik orang Tionghoa yang ada di Palembang yaitu *Kian Gwan* dan *Hok Tok* bergerak di bidang pengolahan komoditas karet (remiling). *Kian Gwan* merupakan sebuah perusahaan yang awalnya berbasis di Pulau Jawa, sedangkan *Hok Tok* berpusat di Singapura.

Selama masa depresi ekonomi tahun 1930, komoditas karet tetap stabil dan mampu menghasilkan keuntungan yang mampu menghidupkan perekonomian kota Palembang. Kondisi tersebut dikarenakan berlakunya suatu peraturan yang disebut "Kupon Karet".¹⁵ Kupon karet berfungsi untuk

¹⁵ Kupon karet merupakan sejenis lisensi yang diberikan kepada

mengontrol jumlah dan produksi karet yang ada di Palembang. Berlakunya sistem Kupon Karet telah menjadi solusi dalam mengatur peredaran karet agar tetap laku dan stabil di kancah pasaran Internasional.¹⁶

D. DAMPAK AKTIVITAS EKONOMI ETNIS TIONGHOA DI PALEMBANG SAMPAI TAHUN 1942

Aktivitas ekonomi yang perankan oleh etnis Tionghoa tentu saja akan memberikan dampak dan

setiap pemilik perkebunan karet. Kupon ini adalah semacam izin produksi yang diberisikan jumlah atau hasil karet yang telah ditentukan oleh pemerintah Belanda. Kupon ini juga berfungsi dalam memberikan hak kepada para pemilik kupon untuk mengekspor karetnya ke luar negeri.

¹⁶ Ujang Hariyadi (ket. Penelitian), *Kupon Karet (kupon izin produksi) Koleksi Museum Negeri Propinsi Jambi*, (Jambi: DEPDIKBUD Kantor Wilayah Jambi Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Jambi, 1996/1997), hlm. 11.

respon yang berbeda bagi berbagai pihak yang ada di Palembang. Dampak tersebut terjadi pada pemerintah kolonial Belanda, orang pribumi dan sesama etnis Tionghoa yaitu kaum *Totok* dan kamu Peranakan. Bagi pemerintah kolonial, etnis Tionghoa berperan sebagai pihak perantara dalam bidang perekonomian. Mereka menjadi perantara bagi pemerintah kolonial dengan pemerintah lokal, penduduk pribumi dan pihak lainnya yang berkaitan dengan bidang perekonomian. Pemerintah kolonial merasa lebih aman memberi kuasa ekonomi kepada etnis Tionghoa.¹⁷

Pemerintah kolonial juga menerapkan

¹⁷ A. Made Tony Supriatna, *Bisnis dan Politik: Kapitalisme dan Golongan Tionghoa di Indonesia*, dalam Lembaga Studi Realino, *Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 76.

suatu kebijakan yang disebut dengan *Wijkenstelsel* dan *Passenstelses*. Tujuan diberlakukannya kebijakan tersebut ialah untuk mengontrol dan mengawasi pergerakan etnis Tionghoa yang ada di Palembang dan seluruh wilayah di Hindia Belanda.¹⁸

Dampak selanjutnya terjadi pada orang-orang pribumi, dampak yang ditimbulkan dari adanya aktivitas ekonomi etnis Tionghoa di Palembang tidaklah terlalu mencolok. Keberadaan etnis Tionghoa di Palembang telah menempatkan penduduk pribumi pada posisis terendah dari segi strata sosial dan ekonomi. Walau demikian, hal tersebut tidak menimbulkan suatu masalah atau konflik yang berarti.

¹⁸ Mariani Dwi Putri, "Kehidupan Masyarakat Cina di Palembang Tahun 1822-1906", *Skripsi*, (Yogyakarta: UNY, 2011), hlm. 71.

Antara penduduk pribumi dan orang Tionghoa tetap terjalin suatu hubungan yang baik yaitu lewat hubungan perdagangan.¹⁹

Adanya industri pengolahan karet milik orang Tionghoa juga berdampak positif bagi penduduk pribumi sebagai pemilik perkebunan karet rakyat. Masyarakat di pedesaan akan menitipkan hasil buminya untuk di pasarkan oleh pedagang Tionghoa begitupun sebaliknya. Para pedagang besar (eksportir) memperoleh karet dari hasil kerjasama dengan orang-orang pribumi. Orang pribumi akan menjual karet mereka kepada orang

¹⁹ Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang (1900-1950)*, (Jakarta: LP3ES, 2003), hlm. 78.

Tionghoa sebagai bahan keperluan industri mereka.²⁰

Dampak selanjutnya adalah timbulnya persaingan antara etnis Tionghoa yaitu kaum Totok dan kaum Peranakan. Golongan Tionghoa Peranakan pada umumnya lebih unggul di bidang sosial-ekonomi dibandingkan golongan *Totok*. Jika Tionghoa Peranakan unggul di bidang perekonomian, maka orang Totok lebih unggul dalam hal yang berkaitan dengan bahasa dan kebudayaan.²¹ Kaum *Totok* masih sangat menjunjung tinggi budaya asli mereka sebagai orang Tionghoa yang berdarah murni.

²⁰ R. Z. Leirissa, dkk, *Sejarah Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2012) hlm, 77.

²¹ Justian Suhandinata, *WNI dan Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 34.

Tidak harmonisnya hubungan kaum *Totok* dan kaum Peranakan, biasanya hanya dikarenakan perbedaan pandangan atau persepsi diantara keduanya. Kaum Peranakan sering mengeluh bahwa kaum *Totok* selalu ingin mendominasi sektor perekonomian dengan mengorbankan kaum Peranakan. Di sisi sebaliknya, kaum *Totok* sering mengeluhkan bahwa Tionghoa Peranakan sering bersifat tidak patriotik dan berperilaku seperti orang non-Tionghoa.²²

E. KESIMPULAN

Palembang sejak dahulu kala telah dikenal sebagai kota dagang dan pelabuhan penting yang ada di Pulau

²² Leo Suryadinata, *Pribumi Indonesians, The Chinese Minority and China*, (Kuala Lumpur: Heineman Educational Books Asia (LTD), 1978), hlm. 93.

Sumatera. Letak kota Palembang pada dasarnya sangatlah strategis terutama bagi jalur perdagangan di nusantara. Posisi ini telah mendatangkan para pedagang baik lokal maupun luar negeri ke kota Palembang. Salah satu dari kelompok dagang yang datang dan berkunjung ke kota Palembang adalah para pedagang Tionghoa. Berbagai literatur menyebutkan, bahwa migrasi etnis Tionghoa ke Palembang dimulai sejak abad ke-16.

Etnis Tionghoa membentuk suatu hubungan dagang dengan pihak Kesultanan Palembang. Pedagang Tionghoa menjadi perantara untuk memenuhi permintaan barang ekspor dan impor. Hubungan ini terus berlanjut dan semakin berkembang hingga datangnya penjajah Belanda. Pada abad ke-20 orang Tionghoa semakin memperluas jaringan dan

kedudukan mereka dengan mengambil peran-peran penting di berbagai sektor perekonomian. Peran penting yang dijalankan etnis Tionghoa pada abad ke-20 adalah menjadi pedagang (pedagang perantara), tukang mindring dan tukang renten (rentenir) serta industri pengolahan hasil-hasil perkebunan.

Aktivitas ekonomi yang dilakukan etnis Tionghoa di kota Palembang telah menimbulkan reaksi yang berbeda. Bagi pemerintah kolonial Belanda, pedagang Tionghoa berperan sebagai pihak perantara untuk kerjasama dengan pemerintah lokal maupun kaum pribumi. Pemerintah kolonial juga menerapkan suatu kebijakan yang disebut peraturan *passenstelsel* dan *wijkenstelsel*. Kedua kebijakan ini bertujuan untuk membatasi pergerakan dan keluar

masuknya etnis Tionghoa di setiap wilayah Hindia Belanda. Bagi masyarakat pribumi sendiri, aktivitas ekonomi dari etnis Tionghoa tidak begitu berdampak besar. Masyarakat pribumi dan etnis Tionghoa mampu hidup secara berdampingan tanpa harus terjadi konflik baik sosial maupun ekonomi.

Dampak lain dari aktivitas ekonomi ini ialah terjadi persaingan antar sesama etnis Tionghoa. Kedua kelompok ini adalah Tionghoa *Totok* dan Tionghoa Peranakan, kedua golongan ini biasanya tidak akur dan tidak menyukai satu sama lain. Ketidakakuran ini disebabkan oleh

perbedaan pandangan atau persepsi di antara keduanya. Tionghoa Peranakan lebih unggul dalam sektor sosial-ekonomi namun lemah dalam hal yang berkaitan dengan kebudayaan nenek moyang mereka. Sebaliknya tidak semua Tionghoa totok sukses dalam sektor perekonomian namun mereka sangat unggul dalam hal yang berbau kebudayaan Cina. Oleh karena itu etnis Tionghoa *Totok* sering menyebut kaum Peranakan tidaklah nasionalis dan berperilaku seperti non-Tionghoa. Masuknya Jepang pada Februari 1942 ke Palembang telah mengakhiri masa pemerintahan Belanda dan menjadi sejarah baru bagi etnis Tionghoa.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip dan Terbitan Resmi

Indisch Verslag, Deel IV, Tahun 1931.

V.B. van Guthem, "Tjina Mindring Eenige Aanteekeningen Over het Chineesche Geldschievterwezen op Java", *Koloniale Studien*, 1919.

Residentie Palembang Hoofdlasts Palembang, Regeerings Almanak vor Nedherlandsch Indie: Landsdrukkerij-Weltevreden, 1931.

Volkstelling 1930, Jilid VIII, *Batavia: Departement van Ecomische Zakaen*, 1935.

Buku-buku dan Artikel

Alexander Irwan, *Jaringan Bisnis dan Identitas Etnis Transnasional*, dalam I. Wibowo, *Harga yang harus Dibayar: Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama (Kerjasama dengan Pusat Studi Cina), 1999.

Al. Heru Kustara, *Peranakan Tionghoa Indonesia Sebuah Perjalanan Budaya*, Jakarta: Intisari Mediatama dan Komunitas Lintas Budaya, 2008.

A. Made Tony Supriatma, *Bisnis dan Politik: Kapitalisme dan Golongan Tionghoa di Indonesia*, dalam Lembaga Studi Realino, *Penguasa Ekonomi dan Siasat Penguasa Tionghoa*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.

Ayu Windy Kinasih, *Identitas Etnis Tionghoa di kota Solo (Etnis Tionghoa dan Heterogenitas Lokal)*, Yogyakarta: Lab Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM, 2007.

Beni. G. Setiyono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik*, Jakarta: Transmedia, 2008.

Die, Oeng Eng, *Peranan Etnis Tionghoa dalam Perdagangan* (terjemahan), dalam Mely G. Tan (ed), *Minoritas Etnis Tionghoa di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1981.

Jr, J.L. Vleming, *Kongsi dan Spekulasi Jaringan Kerja Bisnis Cina*, disadur oleh Bob Widyahartono, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1988.

Justina Suhandinata, *WNI Keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2009.

Jumhari, *Sejarah Sosial Orang Melayu, Keturunan Arab dan Cina di Palembang Dari Masa Kesultanan Palembang Hingga Reformasi*, Padang: BPSN Padang Press, 2010.

Leo Suryadinata, *Pribumi Indonesians: the Chinese Minority and China*, Kuala Lumpur: Heineman Educational Books Asia (LTD), 1978.

Ma'moen Abdullah, *Sejarah Daerah Sumatera Selatan*, Sum-Sel: Depdikbud BPIP Sumatera Selatan, 1997/1998.

Mely G. Tan, *Etnis Tionghoa di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor, 2008.

Mestika Zeid, *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang (1900-1950)*, Jakarta: LP3ES, 2003.

Nurani Soyomukti, *Soekarno & Cina: Nasionalisasi Tionghoa Dalam Revolusi Indonesia Sikap Bung Karno Terhadap Tionghoa di Indonesia*, Yogyakarta: Garasi, 2012.

R.Z. Leirissa, dkk, *Sejarah Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2012.

Teguh Sihono, *Krisis Finansial Amerika Serikat dan Perekonomian Indonesia*, dalam *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Vol. 5, No. 2, Desember 2008.

Tri Wahyuni. M. Irsyam, *Peranan Golongan Etnis Cina Sektor Ekonomi di Jawa Pada masa Kolonial*, Depok: LPUI, 1996.

Ujang Hariyadi (Ketua), *Kupon Karet (kupon izin produksi) Koleksi Museum Negeri Propinsi Jambi*, Jambi: DEPDIKBUD Kantor Wilayah Propinsi Jambi Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Jambi, 1996/1997.

Yang, Twan Peck, *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950*, Jakarta: Diadit Media, 2007.

Skripsi

Mariani Dwi Putri, "Kehidupan Masyarakat Cina di Palembang Tahun 1822-1906", *Skripsi*, Yogyakarta: UNY, 2011.